

LKj-PD

**Laporan Kinerja
Perangkat Daerah**

**Tahun
2024**

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PROBOLINGGO



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024.

LKjPD disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo selama tahun 2024. Penyusunan laporan ini juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan LKjPD ini, kami berupaya menyajikan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Laporan ini kami harapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo selama tahun 2024, serta menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo selama tahun 2024.

Probolinggo, 28 Februari 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

dr. ANANG BUDI YOELIJANTO, M.MKes., MMRS
NIP. 19670707 199703 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan dibidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan amanat UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat 2 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut diatas, maka setiap warga negara diharapkan dapat ikut berperan aktif dalam memberikan kontribusinya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi diri sendiri maupun anggota masyarakat.

Disisi lain pengaruh krisis ekonomi yang berkepanjangan beberapa waktu lalu berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Di bidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian masih menghadapi permasalahan kompleks. Sehubungan dengan tingginya angka pengangguran yang disebabkan karena belum optimalnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja maupun masalah sistem ketenagakerjaan yang belum dikembangkan secara optimal dan professional. Terdapatnya beberapa perusahaan yang dalam tumbuh kembangannya kurang dapat menyerap jumlah pengangguran yang ada, disamping itu masih adanya perusahaan-perusahaan yang kurang mampu dalam memberikan upah yang layak maupun memberikan perlindungan yang wajar bagi pekerjaanya, sehingga hubungan kerjanya menjadi terganggu, hal ini dapat dilihat dengan maraknya tuntutan-tuntutan hak dan kepentingan pekerja melalui pemogokan dan unjuk rasa.

Guna menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan Program-program dan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penyelesaian permasalahan tersebut.

Program dan kegiatan tahun 2024 dimaksud tidak terlepas dari RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PROBOLINGGO Tahun 2024-2026 yang telah ada.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	49
1.3 Landasan Hukum	50
1.4 Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	53
2.2 Indikator Kinerja Utama	63
2.3 Rencana Kinerja Tahunan	64
2.4 Perjanjian Kinerja	65
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Organisasi	68
3.2 Realisasi Anggaran	76
3.3 Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumberdaya	79
3.4 Inovasi	80
3.5 Penghargaan	80
BAB IV. PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kualifikasi Kepegawaian Menurut Jabatan, Eselon Dan Kepangkatan ...	13
Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai	14
Tabel 1.3 Aset Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo	14
Tabel 1.4 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	15
Tabel 2.1 Keselarasan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026 dengan Arah Pembangunan Jangka Panjang serta Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Probolinggo	56
Tabel 2.2 Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026	60
Tabel 2.3 Indikator Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dan Targetnya	61
Tabel 2.4 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ..	63
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	63
Tabel 2.6 Rencana Kinerja Tahunan Pada Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	64
Tabel 2.7 Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	65
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024	66
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	68
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	69
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	71
Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	72
Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja dengan standart Nasional	73
Tabel 3.6 Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	74
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran 2024	76
Tabel 3.8 Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya disetiap indicator	79
Tabel 3.9 Penghargaan Dinas Tenaga Kerja	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo	2
Gambar 3.1 Penghargaan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unsur Sumber Daya Manusia merupakan modal yang sangat berharga dalam menunjang kegiatan pembangunan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan fokus utama untuk selalu dikembangkan sebagai sumber daya yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas tujuan yang optimal, maka perlu ditingkatkan pembinaan, pengembangan serta pelatihan secara teratur dan berkelanjutan sehingga dapat diperoleh tenaga kerja yang terampil, tangguh, berdisiplin tinggi serta mampu menjawab tantangan pembangunan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia meliputi bidang yang luas, mulai dari peningkatan produktivitas tenaga kerja, efisiensi, efektivitas kerja sampai pada perencanaan tenaga kerja, misalnya menyangkut tentang perluasan kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja serta mengatasi pengangguran. Telah menjadi gejala umum bahwa angkatan kerja atau lebih khusus disebut pencari kerja selalu akan bertambah lebih cepat dibanding dengan tingkat kesempatan kerja yang tersedia, Pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sering kali tidak terserap dalam kegiatan ekonomi yang direncanakan, baik pada sektor formal maupun informal, yang berarti akan terus menambah jumlah penganggur.

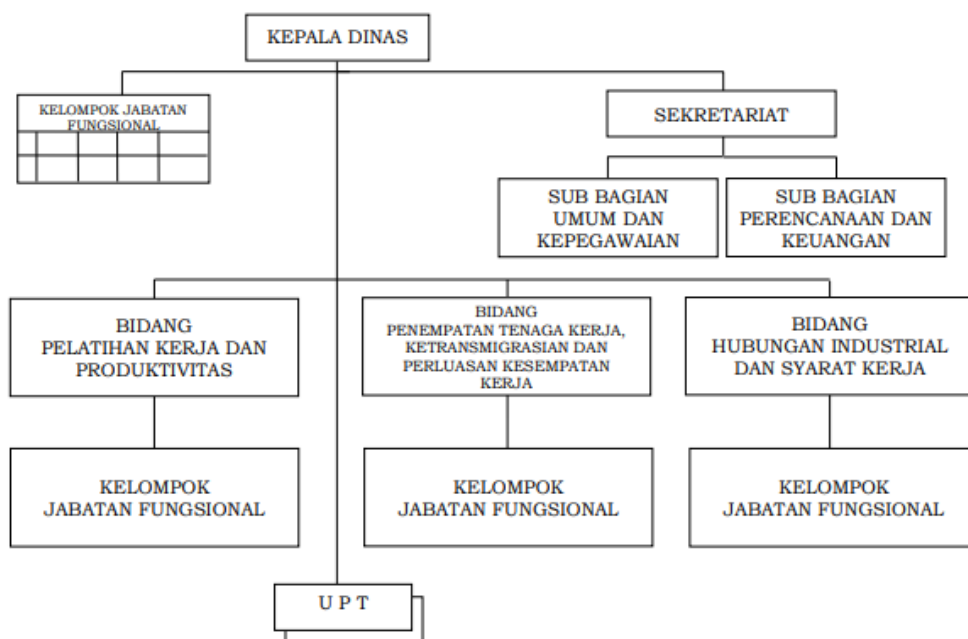
Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini diperlukan perencanaan, pembinaan / pengembangan yang ditindak lanjuti dengan kebijakan-kebijakan memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Sebagai Laporan Kinerja Pemerintahan maka disusunlah buku **“Lkj Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024”**

Dinas Tenaga kerja Kabupaten Probolinggo yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo.

1.1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo



1.1.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang ketenagakerjaan, ketrasmigrasian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- pelaksanaan administrasi dibidang ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Sekertariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 2) pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;

- 3) penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 - 4) penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
 - 5) penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - 7) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 2) penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 4) pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- 5) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- 6) penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- 7) pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan, Kelembagaan Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis kegiatan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan administrasi pelatihan kerja, produktivitas dan penerbitan rekomendasi izin lembaga pelatihan kerja;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1 Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi :

- a. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;
- b. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
- c. menyusun instrument evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
- d. menyusun rencana diseminasi panduan identitas kebutuhan pelatihan masyarakat;
- e. menyusun alat peraga / media pelatihan masyarakat;
- f. melaksanakan pelatihan masyarakat;
- g. menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
- h. mengolah data hasil pendampingan masyarakat;

3.2 Jabatan Fungsional Instruktur Ahli Muda

Tugas Jabatan Fungsional Instruktur Ahli Muda melaksanakan

pelatihan dan pengembangan Pelatihan Kerja. Tugas Instruktur Ahli Muda, meliputi:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas organisasi;
- b. menyusun program pelatihan pada level operator;
- c. menyusun program peningkatan produktivitas bagi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat;
- d. menyusun rencana pelaksanaan pelatihan setiap unit kompetensi atau lesson plan pada level teknisi;
- e. menyusun modul pelatihan pada level operator;
- f. menyusun perangkat penilaian atau instrumen pada program pelatihan pada level operator;
- g. melatih dengan tatap muka pada level operator dan/atau calon Instruktur;
- h. memperbaiki peralatan pelatihan;
- i. melakukan pendampingan pada perusahaan menengah;
- j. melakukan bimbingan konsultasi pada perusahaan menengah;
- k. menyusun perangkat evaluasi hasil pembelajaran pada level teknisi;
- l. melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan atasan.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan ketransmigrasian, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketransmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- b. pelaksanaan fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketransmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- d. pelaksanaan administrasi fasilitasi penempatan calon tenaga kerja, ketrasmigrasian, perluasan kesempatan kerja, penerapan teknologi tepat guna, pembinaan tenaga kerja mandiri dan padat karya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4.1 Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda

Tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda melakukan kegiatan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan. Meliputi :

- a. menganalisis informasi pasar kerja;
- b. melakukan bimbingan jabatan kepada tenaga kerja pernah bekerja atau ter PHK atau disabilitas atau lansia atau alih profesi atau karyawan perusahaan;
- c. melakukan pemantauan operasional lembaga penempatan / bursa kerja raya.

4.2 Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda

Tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda melakukan kegiatan pelayanan antar kerja. Meliputi :

- a. melakukan seleksi administrasi pencari kerja untuk penempatan;
- b. melakukan pembekalan kepada tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja;
- c. menganalisis dokumen perjanjian penempatan / perjanjian;
- d. melakukan pemantauan penempatan tenaga kerja;
- e. melakukan penyelesaian masalah selama penempatan tenaga kerja dalam / luar negeri;
- f. melakukan pendampingan pemulangan tenaga kerja;
- g. mendampingi peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja;
- h. melakukan validasi dan analisis permohonan Pengesahan RPTKA/pencabutan Pengesahan RPTKA/perubahan Pengesahan RPTKA;
- i. menganalisis hasil pemantauan penggunaan Tenaga Kerja Asing.

4.3 Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Tugas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melaksanakan kegiatan swadaya masyarakat yang meliputi :

- a. menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat;
- b. melaksanakan penyuluhan masyarakat;
- c. menyusun instrument evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat;
- d. menyusun rencana diseminasi panduan identitas kebutuhan pelatihan masyarakat;
- e. menyusun alat peraga / media pelatihan masyarakat;
- f. melaksanakan pelatihan masyarakat;
- g. menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat;
- h. mengolah data hasil pendampingan masyarakat;
- i. menyusun instrument evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat;
- j. menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pengorganisasian masyarakat;
- k. mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitas pengorganisasian masyarakat.

4.4 Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama

Tugas Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama melakukan kegiatan pelayanan antar kerja. Meliputi :

- a. mengidentifikasi ketersediaan informasi lowongan pekerjaan untuk penempatan tenaga kerja;
- b. menyusun statistik informasi pasar kerja;
- c. melakukan pelayanan pemberian informasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja;
- d. melakukan layanan pendaftaran pencari kerja;
- e. melakukan bimbingan jabatan kepada pencari kerja yang baru masuk ke pasar kerja;
- f. menganalisis permohonan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
- g. menganalisis kelayakan dokumen pengajuan paspor calon Pekerja Migran Indonesia;

- h. memverifikasi dokumen permohonan pengajuan penggunaan TKA;
- i. melakukan kompilasi data yang akan diserahkan kepada stakeholder/pemangku kepentingan untuk tindak lanjut hasil pemantauan penggunaan TKA;

5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bina hubungan industrial, kesejahteraan dan pengupahan dan persyaratan kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- d. pelaksanaan administrasi kegiatan pembinaan hubungan industrial, lembaga hubungan industrial dan penerapan norma syarat kerja;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5.1 Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Muda

Tugas Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Muda melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan. Meliputi :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan norma ketenagakerjaan teknis;
- b. melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan teknis;
- c. melakukan pemeriksaan ulang dan/atau khusus terhadap penerapan norma ketenagakerjaan;
- d. melakukan kegiatan pengusulan penetapan UMK;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepatuhan ketenagakerjaan diperusahaan;
- f. melakukan fasilitasi pelayanan persyaratan kerja dan company profile.

5.2 Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meliputi:

1. Melakukan pembinaan hubungan industrial
 - a. melakukan penilaian hubungan industrial diperusahaan;
 - b. menyusun peta hubungan industrial;
 - c. menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring sarana hubungan industrial diperusahaan;
 - d. menyusun rencana pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring mekanisme pencegahan perselisihan hubungan industrial, penanganan mogok kerja diperusahaan;
 - e. menyusun rencana pembinaan, bimbingan penyuluhan dan monitoring mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - f. mengidentifikasi pemutusan hubungan kerja dan pelaporan pemutusan hubungan kerja;
 - g. mengidentifikasi unjuk rasa terkait ketenagakerjaan;
 - h. melakukan Layanan audiensi masyarakat/pekerja.
2. Melakukan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - a. melakukan klarifikasi dan fasilitasi;
 - b. melakukan mediasi;
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian bersama/anjuran;
 - d. melakukan monitoring hasil penyelesaian perselisihan hi melalui perundingan bipartit.

5.3 Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meliputi:

1. Penyelenggaraan Layanan Hubungan Industrial
 - a. melakukan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Buruh;
 - b. melakukan Verifikasi Perjanjian Kerja (PKWT);
 - c. melakukan Verifikasi Peraturan Perusahaan;
 - d. melakukan Verifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

- e. melakukan Verifikasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;
 - f. melakukan Verifikasi Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh;
 - g. melakukan Verifikasi Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit;
 - h. melakukan Layanan Konsultasi di bidang hubungan industrial.
2. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan Hubungan Industrial
- a. melakukan penyuluhan/sosialisasi sarana hubungan industrial diperusahaan;
 - b. melakukan bimbingan penyusunan materi perjanjian kerja;
 - c. melakukan bimbingan penyusunan materi peraturan perusahaan;
 - d. melakukan bimbingan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. melakukan monitoring syarat kerja di perusahaan.
3. Melakukan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- a. melakukan klarifikasi dan fasilitasi;
 - b. melakukan mediasi;
 - c. merumuskan kesepakatan mediasi perselisihan hi dalam bentuk perjanjian Bersama;
 - d. merumuskan kesepakatan mediasi perselisihan hi dalam bentuk anjuran;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian bersama/anjuran;
 - f. melakukan monitoring hasil penyelesaian perselisihan hi melalui perundingan bipartit.

5.4 Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial

Tugas Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meliputi:

1. Penyelenggaraan Layanan Hubungan Industrial
- a. melakukan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Buruh;
 - b. melakukan Verifikasi Perjanjian Kerja (PKWT);
 - c. melakukan Verifikasi Peraturan Perusahaan;
 - d. melakukan Verifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - e. melakukan Verifikasi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan;
 - f. melakukan Verifikasi Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh;
 - g. melakukan Verifikasi Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit;

- h. melakukan Layanan Konsultasi di bidang hubungan industrial.
- 2. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan Hubungan Industrial
 - a. melakukan penyuluhan/sosialisasi sarana hubungan industrial perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan penyusunan materi perjanjian kerja;
 - c. melakukan bimbingan penyusunan materi peraturan perusahaan;
 - d. melakukan bimbingan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. Melakukan monitoring syarat kerja di perusahaan.
- 3. Melakukan Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - a. melakukan klarifikasi dan fasilitasi;
 - b. melakukan mediasi;
 - c. merumuskan kesepakatan mediasi perselisihan hi dalam bentuk perjanjian Bersama;
 - d. merumuskan kesepakatan mediasi perselisihan hi dalam bentuk anjuran;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan perjanjian bersama/anjuran;
 - f. melakukan monitoring hasil penyelesaian perselisihan hi melalui perundingan bipartit.

6. UPT

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT BLK. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan keuangan, perlengkapan danrumahtangga;
- d. pelaksanaan penyiapan danpenyediaan sarana serta prasarana pelatihan kerja;
- e. pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap berbagai jenisketrampilan;
- f. pelaksanaan kegiatan uji keterampilan, kompetensi dan sertifikasi

- peserta pelatihan tenaga kerja;
- g. pelaksanaan penghimpunan data dan informasi tentang penyelenggaraan Balai Latihan Kerja;
 - h. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberian informasi pelatihan bagi calon tenaga kerja;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelatihankerja;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Ketransmigrasian dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo sebanyak 50 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 1.1
Kualifikasi Kepegawaian Menurut Jabatan, Eselon Dan Kepangkatan

No	Jabatan	Ese lon	Pangkat/Golongan (Ruang)														No n AS N
			IV	I V	I V	III	III	III	III	II	II	II	II	I	I		
			c	b	a	d	c	B	A	d	C	b	a	d	c	IX	
1.	Kepala Dinas	IIb	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	IIIa	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kepala Bidang	IIIb	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kasi/ subag	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Fungsional	-	-	-	5	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
7.	Staf Pelaksana	-	-	-	-	2	2	1		3	1	-	-	-	-	-	18
	Jumlah	50	1	1	8	7	6	1	0	3	1	-	-	-	-	4	18

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja sebanyak 50 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai

no	Keterangan	Pendidikan								TOTAL
		SD	SLTP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1.	Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan UPT BLK Kabupaten Probolinggo	1	-	15	-	-	2	19	13	50

1.1.3 Aset Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo

Tabel 1.3
Aset Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo

Penggolongan dan Kodefikasi Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan Rp.	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Keterangan
TANAH	2		3.345.246.400,00			
TANAH	2		3.345.246.400,00			
TANAH PERSIL	2		3.345.246.400,00			
TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	2		3.345.246.400,00			
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang	1.738.000.000,00	Pengadaan APBD	18/01/1987	Kantor Tenaga Kerja
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang	1.607.246.400,00	Pengadaan APBD	16/10/2019	BLK Dinas Tenaga

Nama Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan Rp.	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Keterangan
PERALATAN DAN MESIN	1.352,00		5.659.205.564,98			
ALAT BESAR	12,00		35.303.500,00			
ALAT BANTU	12,00		35.303.500,00			
ELECTRIC GENERATING SET	3,00		27.203.500,00			
Portable Generating Set	1,00	Unit	6.682.500,00	Pengadaan APBD	19/02/2014	ALAT BANTU
Portable Generating Set	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	ALAT BANTU
Portable Generating Set	1,00	Unit	12.521.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
MESIN BOR	9,00		8.100.000,00			
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	ALAT BANTU
Lain-lain Mesin Bor	1,00	Unit	900.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	ALAT BANTU
ALAT ANGKUTAN	21,00		1.545.231.507,00			
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21,00		1.545.231.507,00			
KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	6,00		1.197.329.500,00			
Station Wagon	1,00	Unit	75.000.000,00	Pengadaan APBD	01/12/1995	
Station Wagon	1,00	Unit	85.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Station Wagon	1,00	Unit	254.350.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	
Station Wagon	1,00	Unit	213.500.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2017	

Sport Utility Vehicle (SUV)	1,00	Unit	406.579.500,00	Pengadaan APBD	25/05/2015	
Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,00	Unit	162.900.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	DITERIMA DARI KECAMATAN TIRIS
KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1,00		122.102.007,00			
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1,00	Unit	122.102.007,00	Pengadaan APBD	01/04/2016	
KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1,00		79.981.000,00			
Pick Up	1,00	Unit	79.981.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2004	
KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	13,00		145.819.000,00			
Sepeda Motor	1,00	Unit	6.800.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	
Sepeda Motor	1,00	Unit	7.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	
Sepeda Motor	1,00	Unit	7.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	
Sepeda Motor	1,00	Unit	7.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	
Sepeda Motor	1,00	Unit	7.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	
Sepeda Motor	1,00	Unit	11.275.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Sepeda Motor	1,00	Unit	11.275.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Sepeda Motor	1,00	Unit	13.600.000,00	Pengadaan APBD	30/12/2010	
Sepeda Motor	1,00	Unit	13.700.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010	
Sepeda Motor	1,00	Unit	15.180.000,00	Pengadaan APBD	29/10/2013	
Sepeda Motor	1,00	Unit	15.180.000,00	Pengadaan APBD	29/10/2013	
Sepeda Motor	1,00	Unit	15.104.500,00	Pengadaan APBD	25/09/2014	
Sepeda Motor	1,00	Unit	15.104.500,00	Pengadaan APBD	25/09/2014	
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	270,00		1.209.677.000,00			
ALAT BENGKEL BERMESIN	156,00		676.115.000,00			
PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	6,00		45.495.000,00			
Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	1,00	Unit	20.000.000,00	Pengadaan APBD	12/11/2004	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)
Mesin Bor	1,00	Unit	8.050.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Bor
Mesin Gerinda	1,00	Unit	1.010.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Gerinda
Mesin Gerinda	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Gerinda
Mesin Gerinda	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Gerinda
Mesin Pemotong Plat	1,00	Unit	10.435.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Pemotong Plat
PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10,00		23.000.000,00			
Mesin Gerinda Tangan	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Gerinda Tangan
Mesin Gerinda Tangan	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Gerinda Tangan
Mesin Gerinda Tangan	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Gerinda Tangan
Mesin Gerinda Tangan	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Gerinda Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	3.350.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	3.350.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	3.350.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Bor Tangan
Mesin Bor Tangan	1,00	Unit	3.350.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Mesin Bor Tangan
PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	56,00		32.000.000,00			

[illegible]

Perkakas Bengkel Lain-lain	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	perkakas bengkel service lainnya (dst)
Perkakas Bengkel Lain-lain	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	perkakas bengkel service lainnya (dst)
Perkakas Bengkel Lain-lain	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	perkakas bengkel service lainnya (dst)
Perkakas Bengkel Lain-lain	1,00	Unit	7.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	perkakas bengkel service lainnya (dst)
Perkakas Bengkel Lain-lain	1,00	Unit	565.000,00	Pengadaan APBD	09/11/2017	perkakas bengkel service lainnya (dst)
Perkakas Bengkel Lain-lain	1,00	Unit	565.000,00	Pengadaan APBD	09/11/2017	perkakas bengkel service lainnya (dst)
Perkakas Bengkel Lain-lain	1,00	Unit	565.000,00	Pengadaan APBD	09/11/2017	perkakas bengkel service lainnya (dst)
Perkakas Bengkel Lain-lain	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	09/11/2017	perkakas bengkel service lainnya (dst)
PERKAKAS BENGKEL KAYU	23,00		130.350.000,00			
Mesin Gergaji	1,00	Unit	15.000.000,00	Pengadaan APBD	12/11/2004	Mesin Gergaji
Mesin Gergaji	1,00	Unit	15.000.000,00	Pengadaan APBD	12/11/2004	Mesin Gergaji
Mesin Gergaji	1,00	Unit	20.000.000,00	Pengadaan APBD	12/11/2004	Mesin Gergaji
Mesin Gergaji	1,00	Unit	3.700.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Gergaji
Mesin Gergaji	1,00	Unit	3.700.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Gergaji
Mesin Gergaji	1,00	Unit	4.000.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Gergaji
Mesin Gergaji	1,00	Unit	4.000.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Gergaji
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	1,00	Unit	35.000.000,00	Pengadaan APBD	12/11/2004	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	1,00	Unit	2.400.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)
Mesin Bor Kayu	1,00	Unit	1.700.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Bor Kayu
Mesin Bor Kayu	1,00	Unit	1.700.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Bor Kayu
Mesin Bor Kayu	1,00	Unit	1.700.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Bor Kayu
Mesin Penghalus	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Penghalus
Mesin Penghalus	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Penghalus
Mesin Penghalus	1,00	Unit	2.500.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Penghalus
Mesin Penghalus	1,00	Unit	2.500.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	Mesin Penghalus
Mechanical Proses	1,00	Unit	1.225.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	perkakas bengkel kayu lainnya (dst)
Mechanical Proses	1,00	Unit	1.225.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	perkakas bengkel kayu lainnya (dst)
PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	14,00		64.000.000,00			
Lain-lain Perkakas Bengkel Khusus	1,00	Unit	4.000.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)
Lain-lain Perkakas Bengkel Khusus	1,00	Unit	4.000.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)

Lain-lain Peralatan Las	1,00	Unit	2.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	peralatan las lainnya (dst)
Lain-lain Peralatan Las	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	peralatan las lainnya (dst)
Lain-lain Peralatan Las	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	peralatan las lainnya (dst)
Lain-lain Peralatan Las	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	peralatan las lainnya (dst)
Lain-lain Peralatan Las	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	peralatan las lainnya (dst)
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	90,00		144.710.000,00			
PERKAKAS BENGKEL SERVICE	3,00		22.950.000,00			
Lain-lain Perkakas Bengkel Service	1,00	Unit	7.650.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	perkakas bengkel service lainnya (dst)
Lain-lain Perkakas Bengkel Service	1,00	Unit	7.650.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	perkakas bengkel service lainnya (dst)
Lain-lain Perkakas Bengkel Service	1,00	Unit	7.650.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	perkakas bengkel service lainnya (dst)
PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	45,00		81.690.000,00			
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	575.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	575.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	575.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Tool Kit Box
Tool Kit Box	1,00	Unit	575.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Tool Kit Box
Kunci Pipa	1,00	Unit	400.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	400.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	1.250.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	1.250.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	1.250.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	1.250.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	1.300.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	1.300.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pipa

Kunci Pipa	1,00	Unit	1.300.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pipa
Kunci Pipa	1,00	Unit	1.300.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pipa
Engine Stand	1,00	Unit	9.000.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Engine Stand
Engine Stand	1,00	Unit	9.000.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Engine Stand
Engine Stand	1,00	Unit	9.000.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Engine Stand
Engine Stand	1,00	Unit	11.000.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Engine Stand
Engine Stand	1,00	Unit	11.000.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Engine Stand
Kunci Moment	1,00	Unit	530.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Kunci Moment
Kunci Moment	1,00	Unit	530.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Kunci Moment
Kunci Moment	1,00	Unit	530.000,00	Pengadaan APBD	13/11/2017	Kunci Moment
Perkakas Standar (Standart Tool) Lain-Lain	1,00	Unit	2.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)
Perkakas Standar (Standart Tool) Lain-Lain	1,00	Unit	2.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)
Perkakas Standar (Standart Tool) Lain-Lain	1,00	Unit	2.200.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)
PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	29,00		28.230.000,00			
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	150.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	200.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	200.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	200.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	575.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	575.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	575.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	575.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	155.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	155.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	155.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	155.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	870.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	870.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Untuk Engine	1,00	Unit	870.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Untuk Engine
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut

Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	650.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	650.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	650.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	650.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	7.500.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	1,00	Unit	7.500.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut
PERKAKAS BENGKEL KERJA	6,00		3.740.000,00			
Ketam	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Ketam
Ketam	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Ketam
Palu	1,00	Unit	185.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Palu
Palu	1,00	Unit	185.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Palu
Palu	1,00	Unit	185.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Palu
Palu	1,00	Unit	185.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Palu
PERALATAN TUKANG BESI	6,00		6.600.000,00			
Gunting Plat Tangan	1,00	Unit	1.800.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Gunting Plat Tangan
Gunting Plat Tangan	1,00	Unit	1.800.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	Gunting Plat Tangan
Kunci Pas	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pas
Kunci Pas	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pas
Kunci Pas	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pas
Kunci Pas	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Kunci Pas
PERALATAN TUKANG KAYU	1,00		1.500.000,00			
Peralatan Tukang Kayu Lain-Lain	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	peralatan tukang kayu lainnya (dst)
ALAT UKUR	24,00		388.852.000,00			
ALAT KALIBRASI	5,00		3.750.000,00			
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	
Lain-lain Alat Calibrasi	1,00	Unit	750.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	
UNIVERSAL TESTER	4,00		18.000.000,00			
Insulation Res Meter Mod	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	
Insulation Res Meter Mod	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	
Insulation Res Meter Mod	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	
Insulation Res Meter Mod	1,00	Unit	4.500.000,00	Pengadaan APBD	02/11/2017	
ALAT UKUR/PEMBANDING	2,00		600.000,00			
Avometer Su 20 - 20 K	1,00	Unit	300.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	
Avometer Su 20 - 20 K	1,00	Unit	300.000,00	Pengadaan APBD	12/12/2011	
ALAT UKUR LAIN-LAIN	12,00		365.402.000,00			
Bejana Ukur	1,00	Unit	13.534.000,00	Pengadaan APBD	03/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	7.280.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	9.625.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	11.165.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	13.534.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	29.984.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	

Bejana Ukur	1,00	Unit	31.295.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	39.325.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	47.520.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	49.390.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	53.625.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
Bejana Ukur	1,00	Unit	59.125.000,00	Pengadaan APBD	10/07/2007	
ANAK TIMBANGAN/BIARA	1,00		1.100.000,00			
Kilogram Standar	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	27/12/2013	
ALAT PERTANIAN	2,00		4.000.000,00			
ALAT PENGOLAHAN	2,00		4.000.000,00			
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	2,00		4.000.000,00			
Lain-lain Alat Penyimpanan	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	13/03/2014	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)
Lain-lain Alat Penyimpanan	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	13/03/2014	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	744,00		1.070.399.682,98			
ALAT KANTOR	49,00		182.332.423,00			
MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	3,00		17.200.000,00			
Mesin Absen (Time Recorder)	1,00	Unit	5.800.000,00	Pengadaan APBD	19/02/2014	Mesin Absen (Time Recorder)
Mesin Absen (Time Recorder)	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	08/09/2015	Mesin Absen (Time Recorder)
Mesin Penghitung Uang	1,00	Unit	3.400.000,00	Pengadaan APBD	19/02/2014	Mesin Penghitung Uang
ALAT REPRODUKSI (PENGKANDUAN)	1,00		7.475.000,00			
Lain-lain Alat Rontgen	1,00	Unit	7.475.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2013	Alat Reproduksi lainnya
ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	31,00		79.269.370,00			
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	854.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	854.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	29/12/2006	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	29/12/2006	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	3.200.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	Lemari Besi/Metal
Lemari Besi/Metal	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	Lemari Besi/Metal
Lemari Kayu	1,00	Unit	1.364.784,00	Pengadaan APBD	31/12/2002	
Lemari Kayu	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	17/03/2008	
Lemari Kayu	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.343.562,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.343.562,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.343.562,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	2.250.000,00	Pengadaan APBD	07/03/2007	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	

Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	1.847.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	2.980.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	2.980.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	3.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	3.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	
Filing Cabinet Besi	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Brandkas	1,00	Unit	263.200,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Brandkas	1,00	Unit	545.700,00	Pengadaan APBD	31/12/1992	
Lemari Kaca	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	10/10/2007	
ALAT KANTOR LAINNYA	14,00		78.388.053,00			
CCTV - Camera Control Television System	1,00	Unit	24.950.000,00	Pengadaan APBD	24/06/2016	
White Board	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	30/12/2006	
White Board	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	30/12/2006	
Peta	1,00	Unit	58.520,00	Pengadaan APBD	31/12/1997	
Alat Penghancur Kertas	1,00	Unit	4.025.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2015	
Alat Penghancur Kertas	1,00	Unit	4.000.000,00	Pengadaan APBD	16/11/2015	
Alat Penghancur Kertas	1,00	Unit	4.000.000,00	Pengadaan APBD	16/11/2015	
Mesin Absensi	1,00	Unit	18.476.700,00	Pengadaan APBD	16/05/2018	
Display	1,00	Unit	902.875,00	Pengadaan APBD	31/12/2000	
Display	1,00	Unit	975.875,00	Pengadaan APBD	31/12/2002	
Display	1,00	Unit	975.875,00	Pengadaan APBD	31/12/2002	
LCD Projector/Infocus	1,00	Unit	10.300.000,00	Pengadaan APBD	11/03/2024	
Brand Kas	1,00	Unit	4.623.208,00	Pengadaan APBD	31/12/2002	
Brand Kas	1,00	Unit	2.100.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2015	
ALAT RUMAH TANGGA	604,00		811.942.259,98			
MEUBELAIR	436,00		200.886.154,98			
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	54.737,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	417.300,00	Pengadaan APBD	31/12/1992	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	235.875,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	471.750,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	471.750,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	471.750,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	

Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	943.500,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	1.415.250,00	Pengadaan APBD	31/12/2001	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	1.190.000,00	Pengadaan APBD	30/12/2005	
Meja Kerja Kayu	1,00	Unit	1.190.000,00	Pengadaan APBD	30/12/2005	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	159.375,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	159.375,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	159.375,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	159.375,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	159.375,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	159.375,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	159.375,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	159.375,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	159.375,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	239.062,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	239.062,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	239.062,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	394.453,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Kursi Besi/Metal	1,00	Unit	170.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Meja Rapat	1,00	Unit	2.641.000,00	Pengadaan APBD	29/01/2008	
Meja Rapat	1,00	Unit	2.641.000,00	Pengadaan APBD	29/01/2008	
Meja Rapat	1,00	Unit	512.500,00	Pengadaan APBD	02/07/2012	
Meja Rapat	1,00	Unit	512.500,00	Pengadaan APBD	02/07/2012	
Meja Rapat	1,00	Unit	512.500,00	Pengadaan APBD	02/07/2012	
Meja Rapat	1,00	Unit	512.500,00	Pengadaan APBD	02/07/2012	
Meja Telepon	1,00	Unit	209.230,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	
Meja Telepon	1,00	Unit	150.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Meja Panjang	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Meja Panjang	1,00	Unit	650.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Meja Panjang	1,00	Unit	650.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Kasur/Spring Bed	1,00	Unit	1.178.181,78	Pengadaan APBD	01/09/2015	
Kasur/Spring Bed	1,00	Unit	1.178.181,80	Pengadaan APBD	01/09/2015	
Kasur/Spring Bed	1,00	Unit	1.178.181,80	Pengadaan APBD	01/09/2015	
Kasur/Spring Bed	1,00	Unit	1.178.181,80	Pengadaan APBD	01/09/2015	

[illegible]

Kipas Angin	1,00	Unit	745.000,00	Pengadaan APBD	18/11/2019	
Kipas Angin	1,00	Unit	745.000,00	Pengadaan APBD	18/11/2019	
Kipas Angin	1,00	Unit	921.000,00	Pengadaan APBD	08/09/2022	
Kipas Angin	1,00	Unit	921.000,00	Pengadaan APBD	08/09/2022	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
Cold Storage (Alat Pendingin)	1,00	Box	2.995.000,00	Pengadaan APBD	19/06/2023	
ALAT DAPUR	19,00		12.948.500,00			
Kompor Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2012	
Kompor Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	768.500,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	
Kompor Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	768.500,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	
Kompor Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	768.500,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	
Kompor Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	768.500,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	
Kompor Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	2.300.000,00	Pengadaan APBD	18/11/2013	
Kompor Gas (Alat Dapur)	1,00	Unit	1.200.000,00	Pengadaan APBD	27/12/2013	
Tabung Gas	1,00	Unit	700.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	
Tabung Gas	1,00	Unit	700.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	
Tabung Gas	1,00	Unit	700.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	
Tabung Gas	1,00	Unit	700.000,00	Pengadaan APBD	08/10/2013	
Rak Piring Aluminium	1,00	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2009	
Rak Piring Aluminium	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2012	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2009	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2009	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	24/07/2009	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	324.500,00	Pengadaan APBD	22/10/2009	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	
lain-lain Alat Dapur	1,00	Unit	50.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	78,00		362.366.855,00			
Televisi	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010	
Televisi	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	
Televisi	1,00	Unit	4.575.000,00	Pengadaan APBD	21/05/2012	
Televisi	1,00	Unit	7.400.000,00	Pengadaan APBD	17/06/2013	
Televisi	1,00	Unit	6.850.000,00	Pengadaan APBD	24/08/2022	
Televisi	1,00	Unit	17.850.000,00	Pengadaan APBD	08/09/2022	
Loudspeaker	1,00	Unit	1.550.000,00	Pengadaan APBD	24/08/2022	
Sound System	1,00	Unit	6.840.000,00	Pengadaan APBD	25/12/2021	
Wireless	1,00	Unit	1.750.000,00	Pengadaan APBD	30/04/2014	
Camera Video	1,00	Unit	15.000.000,00	Pengadaan APBD	01/06/2012	

Camera Video	1,00	Unit	7.450.000,00	Pengadaan APBD	31/01/2013	
Camera Video	1,00	Unit	6.950.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	
Camera Video	1,00	Unit	6.997.295,00	Pengadaan APBD	19/02/2014	
Camera Video	1,00	Unit	6.900.000,00	Pengadaan APBD	24/02/2014	
Camera Video	1,00	Unit	7.000.000,00	Pengadaan APBD	10/03/2014	
Camera Video	1,00	Unit	7.000.000,00	Pengadaan APBD	14/04/2014	
Camera Video	1,00	Unit	7.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	
Camera Video	1,00	Unit	3.850.000,00	Pengadaan APBD	17/03/2015	
Camera Video	1,00	Unit	6.900.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2015	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.500.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Mesin Jahit	1,00	Unit	5.600.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Lambang Garuda Pancasila	1,00	Unit	45.120,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Lambang Garuda Pancasila	1,00	Unit	45.120,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Lambang Garuda Pancasila	1,00	Unit	45.120,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Seterika	1,00	Unit	300.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Seterika	1,00	Unit	300.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	
Dispenser	1,00	Unit	4.207.000,00	Pengadaan APBD	08/09/2022	
Mimbar/Podium	1,00	Unit	33.200,00	Pengadaan APBD	31/12/1991	
Handy Cam	1,00	Unit	10.800.000,00	Pengadaan APBD	02/06/2006	
Handy Cam	1,00	Unit	8.100.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	
Handy Cam	1,00	Unit	8.830.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Handy Cam	1,00	Unit	7.400.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010	
Handy Cam	1,00	Unit	10.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	
Handy Cam	1,00	Unit	3.085.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2013	
Handy Cam	1,00	Unit	4.400.000,00	Pengadaan APBD	17/03/2015	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	

Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Gordyin/Kray	1,00	Unit	498.000,00	Pengadaan APBD	27/04/2012	
Handtruck Trolly Plastics	1,00	Unit	89.878.000,00	Pengadaan APBD	06/11/2018	
ALAT PEMADAM KEBAKARAN	3,00		8.000.000,00			
Alat Pemadam/Portable	1,00	Unit	4.000.000,00	Pengadaan APBD	18/11/2013	
Alat Pemadam/Portable	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	08/12/2014	
Alat Pemadam/Portable	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	08/12/2014	
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	91,00		76.125.000,00			
MEJA KERJA PEJABAT	2,00		15.750.000,00			
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1,00	Unit	7.875.000,00	Pengadaan APBD	06/12/2012	
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1,00	Unit	7.875.000,00	Pengadaan APBD	06/12/2012	
KURSI KERJA PEJABAT	80,00		34.775.000,00			
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	
Kursi Kerja	1,00	Unit	220.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Kursi Kerja	1,00	Unit	220.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Kursi Kerja	1,00	Unit	220.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Kursi Kerja	1,00	Unit	220.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Kursi Kerja	1,00	Unit	220.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	

Kursi Kerja	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Kursi Kerja	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
Kursi Kerja	1,00	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	
KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	4,00		1.800.000,00			
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2005	
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2005	
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2005	
Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1,00	Unit	450.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2005	
LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5,00		23.800.000,00			
Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1,00	Unit	9.765.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2007	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1,00	Unit	3.475.000,00	Pengadaan APBD	30/06/2011	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1,00	Unit	3.475.000,00	Pengadaan APBD	30/06/2011	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1,00	Unit	3.685.000,00	Pengadaan APBD	03/12/2012	
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1,00	Unit	3.400.000,00	Pengadaan APBD	30/08/2013	
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	21,00		161.036.000,00			
ALAT STUDIO	19,00		153.036.000,00			
PERALATAN STUDIO AUDIO	4,00		35.635.000,00			
Professional Sound System	1,00	Unit	7.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010	
Professional Sound System	1,00	Unit	10.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	
Professional Sound System	1,00	Unit	15.000.000,00	Pengadaan APBD	01/06/2012	
Professional Sound System	1,00	Unit	3.635.000,00	Pengadaan APBD	09/11/2016	
PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	15,00		117.401.000,00			
Camera Electronic	1,00	Unit	5.570.000,00	Pengadaan APBD	02/06/2006	
Camera Electronic	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	
Camera Electronic	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	14/05/2008	
Camera Electronic	1,00	Unit	6.900.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	
Camera Electronic	1,00	Unit	8.300.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	
Photo Tustel	1,00	Unit	5.155.000,00	Pengadaan APBD	26/02/2018	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	10.000.000,00	Pengadaan APBD	15/09/2008	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	7.476.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	9.500.000,00	Pengadaan APBD	15/07/2010	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	

Layar Film/Projector	1,00	Unit	8.350.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2012	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	6.500.000,00	Pengadaan APBD	10/03/2014	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	5.500.000,00	Pengadaan APBD	30/04/2014	
Layar Film/Projector	1,00	Unit	9.550.000,00	Pengadaan APBD	10/02/2016	
Camera Conference	1,00	Unit	16.600.000,00	Pengadaan APBD	24/08/2022	
ALAT KOMUNIKASI	2,00		8.000.000,00			
ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	2,00		8.000.000,00			
Facsimile	1,00	Unit	5.000.000,00	Pengadaan APBD	20/02/2013	
Facsimile	1,00	Unit	3.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6,00		7.928.080,00			
ALAT KEDOKTERAN	6,00		7.928.080,00			
ALAT KEDOKTERAN UMUM	4,00		3.728.080,00			
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1,00	Unit	199.280,00	Pengadaan APBD	31/12/1987	
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1,00	Unit	132.800,00	Pengadaan APBD	31/12/1991	
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1,00	Unit	1.698.000,00	Pengadaan APBD	15/05/2020	
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1,00	Unit	1.698.000,00	Pengadaan APBD	15/05/2020	
ALAT KEDOKTERAN GIGI	2,00		4.200.000,00			
Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi	1,00	Unit	2.100.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	
Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi	1,00	Unit	2.100.000,00	Pengadaan APBD	30/10/2018	
ALAT LABORATORIUM	27,00		105.000.000,00			
UNIT ALAT LABORATORIUM	23,00		87.000.000,00			
ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	3,00		1.800.000,00			
	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	02/04/2015	
	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	02/04/2015	
	1,00	Unit	600.000,00	Pengadaan APBD	02/04/2015	
ALAT LABORATORIUM UMUM	2,00		1.600.000,00			
Spray Gun	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	
Spray Gun	1,00	Unit	800.000,00	Pengadaan APBD	24/10/2018	
ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	18,00		83.600.000,00			
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Bordir Highspeed	1,00	Unit	4.800.000,00	Pengadaan APBD	09/10/2018	
Mesin Jahit Pasang Kancing	1,00	Unit	3.400.000,00	Pengadaan APBD	07/11/2018	

P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2017	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	13.500.000,00	Pengadaan APBD	04/08/2020	Lokal
P.C Unit	1,00	Unit	13.500.000,00	Pengadaan APBD	04/08/2020	Lokal
Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2008	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	10.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2009	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2010	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.900.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	12.500.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2011	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	14.950.000,00	Pengadaan APBD	05/03/2012	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	11.850.000,00	Pengadaan APBD	20/03/2012	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	7.850.000,00	Pengadaan APBD	31/01/2013	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.950.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2013	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.450.000,00	Pengadaan APBD	27/02/2013	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.450.000,00	Pengadaan APBD	27/02/2013	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	6.000.000,00	Pengadaan APBD	04/09/2013	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	7.945.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	11/02/2014	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	10/03/2014	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	7.900.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	25/06/2014	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	20/08/2014	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.800.000,00	Pengadaan APBD	03/03/2015	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	12.470.000,00	Pengadaan APBD	21/04/2015	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.000.000,00	Pengadaan APBD	08/09/2015	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	14/10/2015	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	5.522.726,00	Pengadaan APBD	22/10/2015	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.000.000,00	Pengadaan APBD	27/10/2015	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.700.000,00	Pengadaan APBD	16/11/2015	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	5.375.000,00	Pengadaan APBD	07/12/2016	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	7.000.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2017	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	6.850.000,00	Pengadaan APBD	26/02/2018	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	9.450.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	11.700.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	11.700.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	11.700.000,00	Pengadaan APBD	18/11/2019	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.122.000,00	Pengadaan APBD	30/11/2021	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	8.122.000,00	Pengadaan APBD	30/11/2021	Lap Top
Lap Top	1,00	Unit	42.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	
Lap Top	1,00	Unit	42.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	
Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	
Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	
Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	
Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	
Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	
Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	
Lap Top	1,00	Unit	14.500.000,00	Pengadaan APBD	12/06/2023	

Hard disk Eksternal	1,00	Unit	670.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	670.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	670.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	670.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	670.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	670.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	670.000,00	Pengadaan APBD	20/10/2014	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.815.000,00	Pengadaan APBD	17/03/2015	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.425.000,00	Pengadaan APBD	09/04/2015	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	21/12/2015	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	2.000.000,00	Pengadaan APBD	21/12/2015	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	950.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2017	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	950.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2017	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	950.000,00	Pengadaan APBD	24/11/2017	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.100.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2018	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.050.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.050.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.050.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	1.050.000,00	Pengadaan APBD	04/11/2019	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	920.000,00	Pengadaan APBD	04/08/2020	Lap Top
Hard disk Eksternal	1,00	Unit	920.000,00	Pengadaan APBD	04/08/2020	Lap Top
PERALATAN JARINGAN	11,00		15.860.000,00			
Modem	1,00	Unit	1.500.000,00	Pengadaan APBD	05/03/2014	Lap Top
Modem	1,00	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	21/04/2015	Lap Top
Modem	1,00	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	18/05/2015	Lap Top
Wireless Access Point	1,00	Unit	2.925.000,00	Pengadaan APBD	01/11/2010	Lap Top
Acces Point	1,00	Unit	1.870.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Lap Top
Acces Point	1,00	Unit	925.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	925.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	925.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	925.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	2.440.000,00	Pengadaan APBD	26/03/2014	Lap Top
KABEL LAN PROLINK Cable Cat5e	1,00	Unit	1.425.000,00	Pengadaan APBD	04/04/2014	Lap Top
PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	1,00		771.000,00			
USB-C To USB-A HUB With Ethernet	1,00	Unit	771.000,00	Pengadaan APBD	27/12/2021	Lap Top

Penggolongan dan Kodeifikasi Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Keterangan
GEDUNG DAN BANGUNAN	12		6.502.626.953,23			
BANGUNAN GEDUNG	10		5.253.503.573,23			
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7		3.314.038.764,68			
BANGUNAN GEDUNG KANTOR	5		2.831.947.955,13			
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	944.161.575,79	Pengadaan APBD	31/12/1984	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0

Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	1.433.033.716,80	Pengadaan APBD	31/12/1984	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	376.627.470,80	Pengadaan APBD	31/12/1984	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	41.764.721,87	Pengadaan APBD	31/12/1984	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Meter Persegi	36.360.469,87	Pengadaan APBD	31/12/1984	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	2		482.090.809,55			
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Meter Persegi	385.005.392,75	Pengadaan APBD	31/12/1984	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	Meter Persegi	97.085.416,80	Pengadaan APBD	31/12/1984	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	3		1.939.464.808,55			
RUMAH NEGARA GOLONGAN III	1		3.263.352,15			
Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Meter Persegi	3.263.352,15	Pengadaan APBD	31/12/1984	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	1		2.584.456,40			
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	Meter Persegi	2.584.456,40	Pengadaan APBD	31/12/1984	[Tgl Awal: 31-12-1984] 0
ASRAMA	1		1.933.617.000,00			
Asrama Darurat	1	Meter Persegi	1.933.617.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2019	[Tgl Awal: 31-12-2019] 0
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2		1.249.123.380,00			
TUGU/TANDA BATAS	2		1.249.123.380,00			
TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	1		698.380,00			
Lain-lain Tugu/Tanda Batas	1	Meter Persegi	698.380,00	Pengadaan APBD	15/11/2011	[Tgl Awal: 15-11-2011] 0
PAGAR	1		1.248.425.000,00			
Pagar Permanen	1	Meter Persegi	1.248.425.000,00	Pengadaan APBD	31/12/2019	[Tgl Awal: 31-12-2019] 0

Penggolongan dan Kodefikasi Barang	Jumlah	Satuan	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	11				373.437.291,95	
JALAN DAN JEMBATAN	1				183.877.000,00	
JEMBATAN	1				183.877.000,00	
JEMBATAN PENYEBERANGAN	1				183.877.000,00	
Jembatan Penyebrangan Beton	1	Meter		31/12/2019	183.877.000,00	Mutasi Dari DPKPP tahun 2019
BANGUNAN AIR	1				1.799.091,95	
BANGUNAN AIR IRIGASI	1				1.799.091,95	
BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	1				1.799.091,95	
Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	1	Meter		02/12/2003	1.799.091,95	Bangunan
INSTALASI	8				155.179.500,00	
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1				84.700.000,00	
INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	1				84.700.000,00	
Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Sedang	1	Meter		19/12/2018	84.700.000,00	Bangunan Ukur Di Maleng
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	1				20.900.000,00	
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	1				20.900.000,00	
Instalasi PLTU Kapasitas Sedang	1	Meter		14/12/2007	20.900.000,00	Jaringan
INSTALASI GARDU LISTRIK	6				49.579.500,00	
INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	1				20.366.000,00	
Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	Meter		25/10/2013	20.366.000,00	tambah daya BLK

INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	5				29.213.500,00	
Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	1	Meter		23/08/2013	9.933.500,00	pengadaan instalasi listrik
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	1	Meter		04/09/2009	4.500.000,00	tambah daya
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	1	Meter		10/02/2010	4.900.000,00	Jaringan
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	1	Meter		21/04/2011	4.920.000,00	tambah daya
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar	1	Meter		26/03/2012	4.960.000,00	Jaringan
JARINGAN	1				32.581.700,00	
JARINGAN LISTRIK	1				32.581.700,00	
JARINGAN DISTRIBUSI	1				32.581.700,00	
Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	Meter		01/12/2014	32.581.700,00	Pemeliharaan rutin/berkals sarana dan prasarana aparatur

Penggolongan dan Kodefikasi Barang	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Keterangan
ASET TETAP LAIN	48		22.405.713,74			
BAHAN PERPUSTAKAAN	48		22.405.713,74			
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	40		18.150.000,00			
SERIAL	40		18.150.000,00			
Serial Lain-Lain	40		18.150.000,00			
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	25/04/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	16/08/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	16/08/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	16/08/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	16/08/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	16/08/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	16/08/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	1.000.000,00	Pengadaan APBD	16/08/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	06/11/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	06/11/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	06/11/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	06/11/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	06/11/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	500.000,00	Pengadaan APBD	06/11/2007	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	25/03/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	07/08/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	07/08/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	07/08/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	07/08/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	07/08/2008	

Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	07/08/2008	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	22/05/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	22/05/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	22/05/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	22/05/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	22/05/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	250.000,00	Pengadaan APBD	22/05/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	275.000,00	Pengadaan APBD	14/08/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	275.000,00	Pengadaan APBD	14/08/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	275.000,00	Pengadaan APBD	14/08/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	275.000,00	Pengadaan APBD	14/08/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	275.000,00	Pengadaan APBD	14/08/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	275.000,00	Pengadaan APBD	14/08/2009	
Serial Lain-Lain	1	Unit	275.000,00	Pengadaan APBD	14/08/2009	
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	1		3.979.593,74			
TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA	1		3.979.593,74			
Terekam dan bentuk mikro lainnya	1		3.979.593,74			
Terekam dan bentuk mikro lainnya	1	Unit	3.979.593,74	Pengadaan APBD	31/12/2003	
KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	7		276.120,00			
BAHAN KARTOGRAFI	7		276.120,00			
Atlas	7		276.120,00			
Atlas	1	Unit	16.920,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Atlas	1	Unit	16.920,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Atlas	1	Unit	16.920,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Atlas	1	Unit	43.800,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Atlas	1	Unit	56.640,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Atlas	1	Unit	58.520,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	
Atlas	1	Unit	66.400,00	Pengadaan APBD	31/12/2003	

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik dalam perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

1.2.2 Tujuan

1. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
2. Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah.

3. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
- n. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
- o. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 7a tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- p. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Permasalahan Utama Berdasarkan Tusi

Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Masih Tingginya angka	Jumlah Lapangan Kerja yang Tersedia	1. Kurangnya Lapangan Pekerjaan dan

P e r m	Pengangguran di Kabupaten Probolinggo	Tidak Sebanding Dengan Jumlah Pencari Kerja	Informasi Lowongan Kerja
			2. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia untuk Mengakses Kemajuan Teknologi (Aplikasi SIAP Kerja Online)
			3. Pelatihan yang Kurang Sesuai dengan Keahlian yang di Butuhkan Perusahaan
			4. Akses Informasi mengenai Lowongan Kerja dan Pelatihan yang masih harus di tingkatkan

Permasalahan yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan yang seharusnya terlaksana dengan baik diantaranya Adanya pengurangan jumlah kegiatan padat karya pada kegiatan perluasan kesempatan kerja sehingga berpampak pada jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja. Permasalahan selanjutnya Tidak terlaksananya 2 paket pelatihan dengan jenis pelatihan kejuruan sepeda motor yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kesulitan menemukan perusahaan untuk melaksanakan MoU dan Waktu pelaksanaan yang tidak memadai. Selanjutnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerja Kabupaten Probolinggo terkait pembahasan permasalahan dalam menentukan UMK (Upah Minimum Kabupaten).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPD 2024-2026

2.1.1.1 Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo

Proses pembangunan Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari capaian – capaian yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Selain telah mencapai beberapa kemajuan yang telah diraih, juga masih menyisahkan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Visi pembangunan daerah dalam RPD adalah visi yang mewakili Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Adapun visinya adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO YANG BERDAYA SAING”

Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Probolinggo secara terarah dan terpadu. Kata kunci visi pembangunan Kabupaten Probolinggo adalah “Berdaya Saing” yang bermakna kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kemampuan berdaya saing tercermin pada:

- a. Ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas, berpikiran global, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Probolinggo;
- b. Penguatan perekonomian domestik berbasis keunggulan kompetitif di seluruh wilayah;
- c. Pembangunan infrastruktur yang maju dan berwawasan lingkungan;
- d. Reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

Dengan demikian, pemerintah beserta seluruh stakeholders harus melaksanakan pembangunan sumberdaya manusia, ekonomi wilayah, infrastruktur dan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan demi mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang berdaya saing.

2.1.1.2 Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo

Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut, pemerintah Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan misi berikut pada periode 2005-2025:

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya membentuk manusia yang berakhlak mulia, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya dan memiliki kebanggaan daerah dalam memantapkan landasan spiritual, moral dan etika, dalam pembangunan masyarakat. Karenanya, menyelenggarakan pembangunan sumberdaya manusia dan sosial menjadi keharusan.
2. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum, yaitu memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi pada pemerintahan tingkat kecamatan dan desa; kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Karenanya, penyelenggaraan pembangunan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat menjadi keniscayaan.
3. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pada berbagai tingkat pendidikan; mengintegrasikan pendidikan formal dan informal; menciptakan keseimbangan antara

pendidikan umum dan pendidikan ketrampilan. Penyelenggaraan pembangunan manusia menjadi keharusan.

4. Mewujudkan Probolinggo ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah dan Indah). Adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara keberadaaan, pemanfaatan, dan keberlanjutan sumberdaya alam serta lingkungan hidup. Dengan menjaga fungsinya, daya dukungnya, dan kenyamanan dalam kehidupan sekarang dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi untuk pemukiman, kegiatan sosial dan ekonomi serta upaya konservasi. Karenanya, diperlukan penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan daerah yang berdaya saing, artinya mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan pengetahuan untuk menuju manusia yang kreatif dan inovatif secara berkesinambungan; memperkuat perekonomian berbasis keunggulan potensi lokal menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi dan pelayanan; membangun infrastruktur yang baik dan reformasi di bidang hukum dan aparatur daerah. Untuk hal ini penyelenggaraan pembangunan di segala bidang harus dilakukan.

2.1.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Probolinggo Tahun 2024-2026

Tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dirumuskan dari delapan arah pembangunan jangka panjangnya, khususnya prioritas pada tahap terakhir. Tujuan pembangunan pun dirumuskan sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan isu strategi yang harus dijawab di masa tiga tahun mendatang

Keselarasan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026 dengan Arah Pembangunan Jangka Panjang Serta Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Probolinggo

Tabel 2.1
Keselarasan Tujuan Pembangunan Tahun 2024-2026 dengan Arah
Pembangunan Jangka Panjang serta Isu Strategis Pembangunan Kabupaten
Probolinggo

RUMUSAN TUJUAN PEMBANGUNAN 2024-2026	ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KAB. PROBOLINGGO 2024-2026 yang Dijawab
1. Menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan social dasar dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, berkesetaraan gender dalam suasana masyarakat yang harmonis, aman dan tentram	A. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Beretika, Berbudaya dan Beradab.	Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia
	C. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang Aman dan Damai	
	E. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah, Indah)	
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif berbasis sector potensial yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur berkualitas, merata, dan berwawasan lingkungan	D. Mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo Merata Antar Wilayah Kecamatan	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi disertai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan Penanggulangan dampak Covid-19
	F. Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing	
	G. Mewujudkan Daerah Pesisir dan Dataran Tinggi Kabupaten Probolinggo yang Mampu Menopang Kemandirian Lokal yang Berdaya Saing	
	H. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo Berperan Aktif di Tingkat Regional dan Nasional	
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing	B. Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang Demokratis Berlandaskan Hukum	Reformasi Birokrasi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum

Uraian masing-masing tujuan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurunkan Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) dalam Suasana Masyarakat yang Harmonis, Setara, Aman dan Tentram.

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin (1) Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang ASRI (Aman, Sejahtera, Ramah, Indah),

khususnya pada kata kunci “sejahtera”; (2) Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Beretika, Berbudaya dan Beradab; serta (3) Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang Aman dan Damai. Sebagaimana diuraian di Bab IV dokumen RPD ini, kemiskinan masih menjadi isu strategis yang harus ditangani di tiga tahun mendatang, sehingga harapan Kabupaten Probolinggo “Sejahtera” akan terhambat saat kemiskinan masih relative tinggi dibandingkan kabupaten/kota (rata-rata) di Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Tujuan ini berusaha mewujudkan masyarakat “sejahtera” dari sisi peningkatan daya saing manusianya. Masyarakat akan sejahtera jika memiliki kualitas diri, keluarga dan lingkungan sosial yang baik sehingga berdaya dan mampu bersaing. Hal ini dapat terwujud saat masyarakat sudah keluar dari kemiskinan (tidak miskin), memiliki kualitas kesehatan dan pendidikan yang memadai sehingga mampu bersaing, serta kondisi lingkungan sosial lainnya yang mendukung. Tujuan ini pun menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026, yaitu upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia, serta penanggulangan dampak covid-19 pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Ukuran keberhasilan (Indikator) tujuan ini adalah persentase penduduk miskin yang semakin menurun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) maupun Indeks Kesalehan Sosial yang semakin meningkat antar waktu.

Sasaran atau kondisi yang diharapkan saat tujuan ini tercapai adalah:

- a. Meningkatnya pelayanan sosial dasar dan ketahanan daerah yang ditandai dengan Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang nilainya semakin lama semakin tinggi, Skor Pola Pangan Harapan serta Indeks Ketahanan Daerah yang semakin meningkat;
- b. Meningkatnya kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan serta kesehatan yang diukur melalui indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang semakin tinggi
- c. Meningkatnya kesetaraan gender dengan ukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang semakin baik

- d. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan kerukunan masyarakat dengan ukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban yang semakin tinggi dan Persentase penurunan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kesempatan Kerja yang Didukung Infrastruktur Berkelanjutan

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan yang ingin (1) Mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Probolinggo Merata Antar Wilayah Kecamatan; (2) Mewujudkan Daerah Pesisir dan Dataran Tinggi Kabupaten Probolinggo yang Mampu Menopang Kemandirian Lokal yang Berdaya Saing; serta (3) Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing dan Kabupaten Probolinggo Berperan Aktif di Tingkat Regional maupun Nasional. Pemenuhan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berwawasan lingkungan diharapkan mampu mendukung pengembangan wilayah, sekaligus menjawab isu strategis pertumbuhan dan pemerataan ekonomi disertai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta upaya penanggulangan dampak negatif pandemi covid-19. Ukuran keberhasilan tujuan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi yang semakin meningkat dan mantap, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Gini/Gini rasio yang semakin menurun, serta Indeks Pembangunan Infrastruktur yang semakin meningkat.

Sasaran atau kondisi yang diharapkan saat tujuan ini tercapai adalah:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu (i) Pertumbuhan sub sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Peternakan, Perikanan) yang semakin tinggi; (ii) Pertumbuhan sub sektor industri dan perdagangan yang meningkat; (iii) persentase peningkatan pengeluaran wisatawan yang semakin tinggi; dan (iv) Persentase pertumbuhan omzet koperasi dan usaha mikro yang semakin tinggi
- b. Meningkatnya realisasi investasi daerah dan meningkatnya lapangan kerja daerah yang diukur melalui Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang semakin tinggi atau stabil

- c. Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang ditandai dengan Persentase Desa Mandiri yang semakin tinggi
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang semakin meningkat
- e. Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur daerah yang diukur melalui Persentase Kawasan Pemukiman layak, Indeks Kebinamargaan, sumberdaya air dan tata ruang, dan Indeks Layanan Perhubungan yang semakin tinggi.

3. Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berdaya saing

Tujuan ini dirumuskan dari arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang ingin Mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang Demokratis Berlandaskan Hukum. Tujuan ini pun diharapkan dapat menjawab isu strategis pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026, yaitu peningkatan upaya Reformasi Birokrasi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum. Tujuan ini pun diharapkan mampu memanfaatkan dampak positif dari pandemi covid-19, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam pelayanan publik dan pemerintahan, yang cukup masif sejak pandemi berlangsung. Dampak positif dalam pemanfaatan TIK ini perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien. Ukuran keberhasilan tujuan ini adalah semakin membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran dari tujuan ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas tata kelola yang diukur melalui indikator Nilai SAKIP, Indeks SPBE, Maturitas SPIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Nilai Sistem Merit yang semakin membaik
- b. Meningkatnya pelayanan public yang diukur melalui nilai hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) dan Survey Kepuasan Masyarakat yang semakin meningkat

Tabel 2.2
Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024-2026

Tujuan /Sasaran	Indikator	PD Pengampu Utama
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kesempatan Kerja yang Didukung Infrastruktur Berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka IT (IKU) 7. Indeks Gini / Gini Rasio IT (IKU) 8. Indeks Pembangunan Infrastruktur	
2.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan	9. Pertumbuhan sub sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Peternakan, Perikanan)	Dinas Pertanian; Dinas Perikanan
	10. Pertumbuhan sub sektor industri dan perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
	11. Persentase peningkatan pengeluaran wisatawan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	12. Persentase Pertumbuhan omzet koperasi dan UM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
2.2. Meningkatnya realisasi investasi daerah dan lapangan kerja	13. Pertumbuhan realisasi investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	14. Tingkat Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2.3. Meningkatnya kualitas pembangunan desa	15. Persentase Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

2.5. Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah	17. Persentase kawasan pemukiman layak	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	18. Indeks Kebinamargaan, SDA, dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
	19. Indeks Layanan Perhubungan	Dinas Perhubungan

Tabel 2.3
Indikator Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024-2026 dan Targetnya

TUJUAN		SASARA N		INDIKATOR SASARAN		Kondi si Tahun 2022 (baseli ne)	Target				PD Pengampu Utama
							20 23	2024	2025	2026	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Meningkatkan Kesempatan Kerja di Dukung Infrastruktur Berkelanjutan.	5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi berbasis Sektor Unggulan.	9	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian dalam Arti Luas. (Pertanian, Peternakan, Perikanan)	NA	NA	2.30	2.46	2.67	Dinas Pertanian; Dinas Perikanan	
			10	Pertumbuhan Sub Sektor Industri dan Perdagangan.	NA	NA	6.47	6.80	7.04	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	
			11	Persentase Peningkatan Pengeluaran Wisatawan	NA	NA	3.31	4.28	4.62	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	
			12	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi dan	NA	NA	4.50	5.00	5.00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	

			Usaha Mikro						
		VI	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.25	2.75	2.44	2.16	1.89	
6	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah dan Peningkatan Lapangan Kerja.	13	Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah.	NA	NA	90.82	91.31	91.81	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		14	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	96.74	93.81	96.80	96.85	96.90	Dinas Tenaga Kerja
		VII	Indeks Gini	0.275	0.36	0.35	0.34	0.33	
7	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	15	Persentase Desa Mandiri	7.07	9.23	10	16	20	Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		VIII	Indeks Pembangunan Infrastruktur	NA	55.60	56.53	58.45	59.57	
8	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60.38	62.75	62.86	62.92	62.97	Dinas Lingkungan Hidup

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026, yaitu Tujuan (1) **“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah”**, Tujuan (2) **“Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat”**. Sasaran (1) **“Meningkatnya tata kelola birokrasi perangkat daerah”**, Sasaran (2) **“Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja”**, Sasaran (3) **“Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja”**, Sasaran (4) **“Terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha”**.

Tabel 2.4

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-		
				2024	2025	2026
2	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan / kompetensi	80%	80.5%	81%
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	43%	43.0%	43.5%
		Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, dan Pengupahan	Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	36.5%	37%	37.5%
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah	5%	5%	5%

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terdiri dari Indikator Kinerja Utama sasaran strategis Renstra perubahan Perangkat Daerah sesuai dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang IKU PD.

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Satuan	Sumber Data
Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	Formulasi Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan/	%	Laporan Tahunan

	/ kompetensi	Kompetensi : Pendaftar yang ikut Pelatihan Tahun-N dibagi Pendaftar Keseluruhan dikali 100%		
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Formulasi Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan : Pencari Kerja yang Bekerja dibagi Pencari Kerja dikali 100%	%	Laporan Tahunan
Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan	Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	Formulasi Perselisihan yang Telah Diselesaikan : Perselisihan yang Telah Diselesaikan dibagi Perselisihan yang Terjadi dikali 100%	%	Laporan Tahunan
Meningkatkan TataKelola Birokrasi Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan AKIP= Nilai LHE AKIP Tahun n Dikurangi Nilai LHE AKIP Tahun n-1 dibagi Nilai LHE AKIP Tahun n-1 dikali 100	%	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja sasaran strategis ini kemudian diturunselaraskan (*cascading*) dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya sekaligus diintegrasikan dengan penganggaran

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan Pada Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / kompetensi	%	80%

2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	42,5%
3.	Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan	Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	%	36,5%
4.	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah	%	5%

Tabel 2.7
Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Rencana Aksi			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan / kompetensi	%	80%	20%	20%	20%	20%
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	42,5%	10,6	10,6	10,6	10,6
3.	Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan	Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	%	36,5%	9,1	9,1	9,1	9,1
4.	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah	%	5%	5%	N/A	N/A	N/A

2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja atau pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Melalui perjanjian kinerja antara lain, diharapkan dapat terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keterampilan/ Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan / kompetensi	80 %
2.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja ditempatkan	43 %
3.	Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, dan Pengupahan	Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	36,5 %
4.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Presentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah	5 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN (SUMBER ANGGARAN)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.607.375.674	DTU-DAU
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 474.851.500	DTU-DAU
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 5.696.289.152	DBHCHT
4.	Program Hubungan Industrial	Rp. 56.000.000	DTU-DAU
	Total	Rp. 12.834.516.326	

Permasalahan yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 dalam melaksanakan program dan kegiatan yang seharusnya terlaksana dengan baik diantaranya Adanya pengurangan jumlah kegiatan padat karya pada kegiatan perluasan kesempatan kerja sehingga berpampak pada jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja. Permasalahan selanjutnya Tidak terlaksananya 2 paket pelatihan dengan jenis pelatihan kejuruan sepeda motor yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kesulitan menemukan perusahaan untuk melaksanakan MoU dan Waktu pelaksanaan yang tidak memadai. Selanjutnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan FGD (Focus Group Discussion) dengan perusahaan-perusahaan di wilayah kerja Kabupaten Probolinggo terkait pembahasan permasalahan dalam menentukan UMK (Upah Minimum Kabupaten).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan pengukuran capaian atas kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja utama dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan target yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dengan Bupati Probolinggo tahun 2024. Sedangkan capaian indikator kinerja individu dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target yang diperjanjikan antara atasan selaku pemberi amanah dengan staf sebagai penerima amanah secara berjenjang.

Hasil capaian kinerja diberikan skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Lebih dari 100	Sangat Baik
2.	75 – 100 %	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	≤ 50 %	Kurang

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2024, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1.	Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / kompetensi	80%	80%	100%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang di tempatkan	42,5%	42,5%	100%	Sangat Baik
3.	Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, dan Pengupahan	Persentase Peningkatan penyelesaian perselisihan kausu ketenagakerjaan	36,5%	36,5%	100%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah	5%	N/A	-	-

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator pada sasaran Meningkatkan keterampilan/ kompetensi tenaga kerja memiliki nilai capaian sebesar 100% sehingga didapat predikat SANGAT BAIK, sedangkan untuk sasaran Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja memiliki capaian sebesar 100% dan memiliki predikat SANGAT BAIK, dan untuk sasaran Meningkatkan Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan memiliki capaian sebesar 100% dan memiliki predikat SANGAT BAIK.

Sasaran strategis Meningkatkan keterampilan/ kompetensi tenaga kerja diukur dengan indikator Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan / kompetensi yang didapatkan dari pengukuran pendaftar yang ikut pelatihan Tahun-N dibagi pendaftar keseluruhan dikali 100%, sedangkan sasaran Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dikur dengan

indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan yang didapatkan dari pengukuran pencari kerja yang bekerja dibagi pencari kerja dikali 100%, dan sasaran Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan dikur dengan indicator Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan didapatkan dari pengukuran perselisihan yang telah diselesaikan dibagi perselisihan yang terjadi dikali 100%.

Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan / kompetensi adalah indikator program Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja sedangkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan / kompetensi merupakan intermediate outcome dari program Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja. Pada program Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja, target dan capaian indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Target dan Capaian Indikator program Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan / kompetensi <u>Meta Indikator :</u> Pendaftar yang ikut Pelatihan Tahun-N dibagi Pendaftar Keseluruhan dikali 100%	80%	80%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa target yang dicanangkan yaitu tercapainya sebanyak 80% dapat terealisasi sebesar 80%.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan adalah indikator Program Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja sedangkan Pencari kerja yang bekerja merupakan intermediate outcome dari Program Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Pada Program Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, target dan capaian indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Target dan Capaian Indikator Program Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan <u>Meta Indikator :</u> Pencari Kerja yang Bekerja dibagi Pencari Kerja dikali 100%	42,5%	42,5%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa target yang dicanangkan yaitu tercapainya sebanyak 42,5% dapat terealisasi sebesar 42,5%.

Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan adalah indikator program Meningkatkan Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan sedangkan perselisihan yang telah diselesaikan merupakan intermediate outcome dari program Meningkatkan Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan. Pada Program Meningkatkan Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan, target dan capaian indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Target dan Capaian Indikator Program Meningkatkan Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial dan Pengupahan	Persentase peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan <u>Meta Indikator :</u> Perselisihan yang Telah Diselesaikan dibagi Perselisihan yang Terjadi dikai 100%	36,5%	36,5%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa target yang dicanangkan yaitu tercapainya sebanyak 36,5% dapat terealisasi sebesar 36,5%.

Terdiri dari:

- Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ke-n

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja	1.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / kompetensi	%	80	80	100
2.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	2.	Persentase pencari kerja yang di tempatkan	%	42,5%	42,5%	100
3.	Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, dan Pengupahan	3.	Persentase Peningkatan penyelesaian perselisihan kausu ketenagakerjaan	%	36,5%	36,5%	100
4.	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	4.	Presentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah	%	5	N/A	-

Pada tabel capaian kinerja Tahun 2024, pada sasaran yang pertama “Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja” dapat diukur dengan tingkat pengukuran capaian kinerja pada indikator sasaran yang pertama mempunyai makna progres positif yaitu dikategori **Berhasil**. pada sasaran yang Kedua “Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja” dapat diukur dengan tingkat pengukuran capaian kinerja pada indikator sasaran yang kedua mempunyai makna progres positif yaitu dikategori **Berhasil**. pada sasaran yang Ketiga “Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, dan Pengupahan” dapat diukur dengan tingkat pengukuran capaian kinerja pada indikator sasaran yang ketiga mempunyai makna progres positif yaitu dikategori **Berhasil**. pada sasaran yang Keempat “Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah” belum dapat diukur Karena evaluasi Inspektorat belum dilakukan maka nilai SAKIP belum dapat ditentukan.

- b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir RPD yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.

Tabel 3.4
Perbandingan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi			Target Akhir RENSTRA	
					2024	2025	2026	2026	Capaian 2024 Terhadap Target 2026
1	Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja	1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / kompetensi	%	80%	-	-	80%	100 %
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	42,5 %	-	-	43,5	97,7 %

3	Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, dan Pengupahan	3	Persentase Peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	%	36,5 %	-	-	37,5	97,3%
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	4	Persentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah	%	N/A	-	-	5%	

- c. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada).

Tabel 3.5
Perbandingan Kinerja dengan standart Nasional

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA		SATUAN	REALISASI TAHUN		
			2022	2023	2024
1	NASIONAL	Persentase	5,86	5,32	4,91
2	PROVINSI JAWA TIMUR	Persentase	5,49	4,88	4,19
3	KABUPATEN PROBOLINGGO	Persentase	3,25	3,24	3,00

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Data ini biasanya digunakan sebagai indikator penting untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPT biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

Secara nasional, IPM mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 5,86% pada 2022 menjadi 4,91% pada 2024. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, penurunan juga terlihat dari 5,49% pada 2022 menjadi 4,19% pada 2024. Di Kabupaten Probolinggo, meskipun sedikit stagnan, penurunan tetap terjadi,

dengan angka IPM 3,25% pada 2022 dan diperkirakan mencapai 3,00% pada 2024.

Penting untuk dicatat bahwa angka IPM ini mencerminkan kualitas hidup berdasarkan berbagai faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, dan penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan kualitas tersebut di masing-masing tingkat wilayah.

d. Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Berisi penjelasan identifikasi keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta alternatif solusi dan inovasi yang telah dilakukan serta program dan kegiatan apa saja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut.

Tabel 3.6
Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Keberhasilan	Faktor Pendukung	Kegagalan	Kendala atau Permasalahan	Alternatif solusi/ Inovasi	Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ inovasi
1.	- Menyalurkan tenaga kerja dari 736 orang peserta pelatihan, diterima kerja di perusahaan 574 orang - Kita dipercaya perusahaan dalam bentuk MOU tentang penempatan tenaga kerja - Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat Kompetensi sebanyak 666.164 Orang.	- Program pembangunan nasional dengan adanya jalan tol melewati Kabupaten Probolinggo akan berpotensi bertambahnya perusahaan di Kabupaten Probolinggo, Disnaker memfasilitasi perekrutan calon karyawan dengan pelatihan kerja - UMK masih di bawah daerah lainnya sehingga mendukung penyerapan tenaga kerja	Masih Banyak Pengangguran di kabupaten probolinggo	- Pelaksanaan baru bisa di mulai mei, Pencairan dana terbagi menjadi 2, GU dan Kartu kredit, - Pelaksanaan pengadaan harus per rekening, dmna tahun sebelum nya tdk. Sehingga berkas yg harus di lengkapi lebih banyak, Informasi - pelaksanaan kartu kredit tidak valid. Penyedia harus domisili kab, rek harus Bank Jatim Kab. Sebenar	Mengalihkan pelatihan menjadi kebutuhan perusahaan	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi)

				nya tdk seperti hal tsb. Sehingga mengganggu pelaksanaan penyerapan anggaran		
2.	Jumlah penempatan tenaga kerja sejumlah 1551 orang pada Perusahaan Dalam dan Luar Negeri	• Membangun hubungan/ kerjasama dengan perangkat kecamatan/ desa • Kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja • Perlu adanya keterlibatan dan kepedulian dari Kecamatan dan Perangkat Desa terhadap warganya yang bekerja ke luar negeri baik data maupun penanganan permasalahannya • Dukungan anggaran baik APBD maupun Dana Desa	• Terdapat satu titik padat karya yang tidak terlaksana • Masih banyaknya PMI yang bekerja dengan jalur ilegal	• Terbatasnya Anggaran/Adanya Recofusing • Kendala Cuaca pada saat Pelaksanaan, Medan yang ekstrim, • keterbatasan sumber air di titik kegiatan • Masih kurang pemahaman masyarakat cara bekerja ke luar negeri secara resmi • Masih kurangnya sarana mobil untuk fasilitasi / pendampingan pemulangan PMI Bermasalah baik karena deportasi, sakit maupun PMI yang meninggal	• Dapat dilaksanakan di tahun selanjutnya • Pekerjaan menyesuaikan dengan cuaca • Melaksanakan pembelian agar kegiatan dapat terlaksana • Mengadakan sosialisasi cara bekerja ke luar negeri secara resmi • Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk pemulangan PMI Bermasalah karena sakit dan PMI yang meninggal	Program penempatan tenaga kerja
3.	Sertifikat kepatuhan kepada perusahaan	UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU no 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja	Masih adanya perselisihan yang terjadi antara pekerja dan perusahaan	Sarpras yang kurang memadai Tingkat kepatuhan perusahaan kurang didukung oleh perusahaan dalam hal memenuhi syarat kerja	Pembinaan kerja di optimalisasi	Program Hubungan Industrial

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah seberapa besar anggaran yang telah digunakan atau dibelanjakan dari anggaran yang telah dialokasikan untuk suatu program atau kegiatan. Realisasi anggaran yang lebih rendah dari alokasi anggaran menunjukkan adanya sisa anggaran yang tidak terpakai. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terlambatnya pelaksanaan kegiatan, adanya efisiensi dalam pengadaan barang/jasa, atau bahkan penundaan pelaksanaan proyek. Angka efisiensi anggaran yang lebih tinggi dari 90% umumnya menunjukkan manajemen anggaran yang cukup baik, meskipun ada ruang untuk perbaikan guna mencapai 100% penggunaan anggaran.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran 2024

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Output/Keluaran			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.607.375.674	6.172.919.232	93,42	DAU	Nilai LHE AKIP PD	5 %		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.349.000	45.810.450	98,84	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan tepat waktu	4 dokumen	4 dokumen	100
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.649.000	9.626.600	99,77	DAU	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.918.000	10.516.000	96,32	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100
1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.856.000	9.766.400	99,09	DAU	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.631.000	9.611.800	99,80	DAU	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100
1.5	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	6.295.000	6.289.650	99,92	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.782.991.000	4.651.437.250	97,25	DAU	Prosentase dokumen penatausahaan keuangan yang disusun tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100

2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.782.991.000	4.651.437.250	97,25	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 pegawai	33 pegawai	100
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.038.000	3.986.700	98,73	DAU	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.126.000	188.651.200	92,87	DAU	Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	85	85	100
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.488.000	16.288.500	98,79	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.883.600	129.617.500	90,08	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.268.000	11.264.600	99,97	DAU	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.782.400	15.778.600	99,98	DAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.704.000	15.702.000	99,99	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.218.551.311	940.148.208	77,15	DAU	Prosentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	2 Laporan	2 Laporan	100
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	115.398.439	88,77	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.088.551.311	824.749.769	75,77	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.320.363	342.885.424	97,32	DAU	Prosentase Barang Milik Daerah kondisi baik	6 Unit	6 Unit	100
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.500.000	54.123.600	92,52	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	2 unit	100
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.360.000	23.990.000	98,48	DAU	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	3 unit	100
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	269.460.363	264.771.824	98,26	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100
B.	Program Penempatan				DAU	Persentase pencari kerja	42,5 %	42,5 %	100

	Tenaga Kerja	474.851.500	461.924.869	97,28		yang ditempatkan			
2	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	474.851.500	461.924.869	97,28	DAU	Persentase Pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	85 %	97 %	99,26 %
2.1	Pelayanan antar Kerja	60.000.000	53.794.740	89,66	DAU	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	10 Orang	28 Orang	280 %
2.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	10.000.000	9.809.629	98,10	DAU	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	10 Orang	15 Orang	150 %
2.3	Perluasan Kesempatan Kerja	404.851.500	398.320.500	98,39	DAU	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	200 Orang	102 Orang	51 %
C	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.696.289.152	5.373.334.850	94,33	DBHCHT	Persentase kelulusan peserta pelatihan kerja	80%	80%	100
3	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.696.289.152	5.373.334.850	94,33	DBHCHT	Jumlah peserta yang lulus pelatihan	768 Orang	736 Orang	95,83
3.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	5.696.289.152	5.373.334.850	94,33	DBHCHT	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	768 Orang	736 Orang	95,83
D	Program Hubungan Industrial	56.000.000	54.540.800	97,39	DAU	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	36,5 %	36,5 %	100
4	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.000.000	54.540.800	97,39	DAU	Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan dan memiliki perjanjian kerja bersama	100%	100%	100
4.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	56.000.000	54.540.800	97,39	DAU	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	100
	Jumlah	12.834.516.326	12.062.719.751	93,99					

Kendala dalam penyerapan anggaran adalah adanya ketentuan pada penyerapan anggaran dan penyesuaian anggaran dilakukan beberapa kali pada tahun 2024 sehingga pada saat penyesuaian anggaran kegiatan keuangan tidak dapat berjalan seperti semestinya. Strategi penyelesaian yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya kami akan mengoptimalkan waktu dan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan pemantauan dan pengawasan program, evaluasi kinerja dan penyesuaian anggaran.

3.3. Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya.

Pengukuran pada tingkat efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan, terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Sehingga proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien, apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya, dan dana seminimal mungkin (*spending well*).

Tabel 3.8
Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya disetiap indikator

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%) (5/4) x 100%	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%) (8/7) x 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan keterampilan / kompetensi	80%	80%	100	5.696.289.152	5.373.334.850	94,33	5,67
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	42,5 %	42,5 %	100	474.851.500	461.924.869	97,28	2,72
3	Meningkatnya Hubungan Industrial, Jaminan Sosial, dan Pengupahan	Persentase Peningkatan penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	36,5 %	36,5 %	100	56.000.000	54.540.800	97,39	2,61
4	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE SAKIP Perangkat Daerah	5 %	N/A	-	6.607.375.674	6.172.919.232	93,42	-

Secara keseluruhan, semua sasaran strategis terkait peningkatan keterampilan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, dan tata kelola Birokrasi tercapai dengan baik (mencapai 100% dari target). Efisiensi anggaran cenderung baik dengan sebagian besar capaian anggaran di atas 90%, meskipun tingkat efisiensi per program bervariasi.

Kelemahan atau permasalahan yang terjadi adalah capaian target sudah tercapai 100% di beberapa strategi, pada beberapa indikator, efisiensi anggaran masih di bawah 100%. Ini menandakan bahwa meskipun tujuan tercapai, ada kemungkinan penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya optimal. Ini bisa mengindikasikan adanya pemborosan anggaran atau alokasi yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan kegiatan.

Kendala dalam penyerapan anggaran adalah adanya ketentuan pada penyerapan anggaran dan penyesuaian anggaran dilakukan beberapa kali pada tahun 2024 sehingga pada saat penyesuaian anggaran kegiatan keuangan tidak dapat berjalan seperti semestinya. Strategi penyelesaian yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya kami akan mengoptimalkan waktu dan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3.4. Inovasi

Dinas Tenaga Kerja memiliki sebuah Inovasi yang bernama **Sistem InforMasi satU daTa memBAngun PEluang keRja “SI IMUT BAPER”** Bertujuan untuk mendata perusahaan, karyawan perusahaan dan menggali lowongan kerja yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Inovasi ini masih dalam tahap embrio dan kami berharap dapat mengembangkan inovasi tersebut.

pada tahun 2024 inovasi tersebut mengalami kendala karena kita menggunakan system open souch dimana sangat rentan terhadap peretasan data. Pada tahun 2025 inovasi “SI IMUT BAPER” akan kami diskusikan dengan pihak ketiga agar inovasi yang telah di rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat untuk penyebaran informasi terkait ketenagakerjaan.

3.5. Penghargaan

Penghargaan adalah suatu bentuk pengakuan terhadap pencapaian, prestasi, atau kontribusi seseorang atau kelompok dalam suatu bidang tertentu. Penghargaan dapat diberikan oleh individu, lembaga, organisasi, atau pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya dan hasil yang telah dicapai. Penghargaan yang berhasil dinas tenaga kerja dapatkan ada dua perhargaan yaitu Penghargaan Data Terbaik dan Penghargaan SIDDHAKARYA.

Tabel 3.9
Penghargaan Dinas Tenaga Kerja

No	PERANGKAT DAERAH	BIDANG/ KATEGORI	JENIS PENGHARGAN
1.	Dinas Tenaga Kerja	Data BPS	Penghargaan Data Terbaik
2.	Dinas Tenaga Kerja	Perusahaan Berprestasi	Penghargaan SIDDHAKARYA

Penghargaan Data Terbaik kita peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo sebagai instansi kategori pengumpulan data daerah dalam angka Tahun 2023 Terbaik pada kegiatan Focus Group Discussion Dalam Rangka Optimalisasi Penyusunan Publikasi Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2025 Dan Pembinaan Statistik Sektor

Penghargaan SIDDHAKARYA kita peroleh sebagai apresiasi atas peran aktif dan dukungan pemerintah dalam pembinaan perusahaan local. Dengan tujuan Menjaga produktivitas nasional melalui perusahaan-perusahaan di Kabupaten Probolinggo, Menjaga kualitas produktivitas dan daya saing perusahaan, dan Membuka lapangan pekerjaan untuk Kabupaten Probolinggo.

Gambar 3.1
Penghargaan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024



Dinas Tenaga Kerja Terima Penghargaan Pengumpulan Data Daerah Dalam Angka Terbaik



Pj. Bupati Probolinggo Terima Penghargaan Siddhakarya 2024 (Dukungan dalam pembinaan Perusahaan)

BAB. IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dinas Tenaga Kerja melaksanakan tugas fungsi dengan menitik beratkan pada dua hal, yang pertama upaya peningkatan Sumber Daya Manusia bagi para pencari kerja dengan menambah dan membuka jenis kejuruan baru di Balai Latihan Kerja (BLK), hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pengembangan manajemen usaha bagi pencari kerja dan masyarakat guna membuka peluang usaha dan kesempatan kerja. Ke dua meningkatkan akses lowongan kerja bagi para pencari kerja dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan dan membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi.

Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja adalah Tingkat Kesempatan kerja capaian kinerjanya dengan kategori **sangat baik**. Semakin tinggi Tingkat Kesempatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja (labour supply) pada lapangan usaha formal dan informal. Untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Utama strateginya antara lain dengan meminimalisir konflik antara perusahaan dengan pekerja melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan kepada para pekerja dan pengusaha sebagai wujud keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, sehingga tercapainya kenyamanan suasana kerja. Selain itu dilakukan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di dinas tenaga kerja dan tempat yang ditunjuk sebagai lokasi pelatihan serta kegiatan bimbingan jabatan (sosialisasi pada siswa SMA/SMK yang mau lulus sekolah tentang informasi pelatihan dan lowongan kerja)

1.2 Saran

Untuk meningkatkan capaian kinerja kedepannya diharapkan dapat dilakukan penyempurnaan Program/kegiatan yang relevan terhadap sasaran kinerja yang akan dicapai. Penyempurnaan terhadap program kegiatan diharapkan dapat mempertajam instrument dalam pencapaian sasaran kinerja. Strategi kedepannya yaitu :

1. Mengidentifikasi jenis-jenis pelatihan yang menjadi kebutuhan perusahaan dan masyarakat.
2. Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang lowongan kerja baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

3. Menjalin hubungan baik dengan Kemenaker dan Stakeholder lainnya dalam Pemenuhan pendataan hubungan industrial dan syarat kerja.

Probolinggo, 28 Februari 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

dr. ANANG BUDI YOELIJANTO, M.MKes., MMRS
NIP. 19670707 199703 1 004